

EFEKTIVITAS MODEL SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SINANGKIS) DALAM PENDATAAN DAN PELAPORAN PENDUDUK MISKIN KECAMATAN CIKEUSIK KABUPATEN PANDEGLANG

Wahyu Awaludin^a dan Kandung Sapto Nugroho^b

^aProgram Pascasarjana

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

^b Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

e-mail : a awaludinwahyu063@gmail.com, b kandung.sapto@untirta.ac.id

Abstrak

Adanya data penduduk miskin di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang tidak *up to date* dan belum menggunakan *website*. Serta terdapat ketidakakuratan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang Khususnya Kecamatan Cikeusik, sehingga adanya program bantuan masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran. Untuk itu pemerintah mengeluarkan aplikasi SINANGKIS yang dengan aplikasi ini diharapkan pendataan jumlah penduduk miskin akan *up to date* sehingga program pengentasan kemiskinan akan berjalan optimal. Namun peneliti menemukan bahwa penggunaan aplikasi SINANGKIS dalam mengatasi kemiskinan dan pendataan penduduk miskin di Kecamatan Cikeusik-Pandeglang masih belum optimal dan belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi SINANGKIS di Kecamatan Cikeusik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan dengan menganalisis permasalahan secara mendalam dan natural. Adapun hasil penelitian ini bahwa aplikasi SINANGKIS di Kecamatan Cikeusik belum berjalan optimal karena mengalami beberapa hambatan diantaranya Sarana dan prasarana, SDM seperti operator SINANGKIS yang kurang menguasai, rendahnya pendidikan serta kurangnya koordinasi dan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat terkait penggunaan aplikasi SINANGKIS tersebut sehingga aplikasi tidak berjalan optimal. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masih kurangnya koordinasi antar tiap SKPD dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga aplikasi SINANGKIS tidak berjalan optimal.

Kata Kunci: Model Informasi, Pendataan, Pelaporan Penduduk

Abstract

This research uses a qualitative method which describes analyzing problems in depth and naturally. The results of this research show that the SINANGKIS application in Cikeusik District has not run optimally because it has experienced several obstacles including facilities and infrastructure, human resources such as SINANGKIS operators who lack control, low education and lack of coordination and outreach to officials and the community regarding the use of the SINANGKIS application so that the application does not run optimally. Researchers can draw the conclusion that there

is still a lack of coordination between each SKPD and a lack of outreach to the community, so that the SINANGKIS application does not run optimally.

Keywords: Information Model, Data Collection, Population Reporting

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang Indonesia selalu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", maka Pemerintah Indonesia sejak zaman orde lama hingga saat ini mengupayakan masyarakat Indonesia dapat terbebas dari kemiskinan. (Komplementer and Bisnis 2016) Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. (Persentase and Miskin 2015) Selain itu, jika kemiskinan di Indonesia berkurang secara signifikan, maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan akut yang terjadi seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya akan segera terselesaikan. (Umam et al. 2022). Mengingat kemiskinan adalah masalah multidimensional maka upaya penanggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun komponen dari masyarakat sendiri. (Organisasi 2019) Diantara saluran yang dapat diharapkan untuk menanggulangi kemiskinan adalah desentralisasi fiskal. Terdapat beberapa argumentasi mengenai keterkaitan desentralisasi fiskal dengan upaya dan penanggulangan kemiskinan memiliki kesamaan ciri. *Pertama*, definisi yang dipakai

untuk menjelaskan keduanya berubah seiring berkembangnya pemahaman manusia terhadap keduanya. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, kedua konsep tidak mudah dikuantifisir. *Ketiga*, yang lebih substantif, keduanya sangat berhubungan dengan pemberdayaan (*empowerment*). (Nasional et al. n.d.) Desentralisasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan pemerintah daerahnya, sementara penanggulangan kemiskinan juga menyangkut pemberdayaan sekelompok masyarakat, yakni masyarakat miskin. (Kasus et al. 2016). empat desa yang paling sedikit pengaksesnya yaitu Desa Setrajaya dengan jumlah pengakses 1 pengakses. (Sumber Disdukcapil 2022).

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan dengan menganalisis permasalahan secara mendalam dan natural. Adapun hasil penelitian ini bahwa aplikasi SINANGKIS di Kecamatan Cikeusik belum berjalan optimal karena mengalami beberapa hambatan diantaranya Sarana dan prasarana, SDM seperti operator SINANGKIS yang kurang menguasai, rendahnya pendidikan serta kurangnya koordinasi dan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat terkait penggunaan aplikasi SINANGKIS tersebut sehingga aplikasi tidak berjalan optimal. (Odel and Emiskinan 2020). Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masih kurangnya koordinasi antar tiap SKPD dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga aplikasi SINANGKIS tidak berjalan optimal. (Putra 2016).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih sangat

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

membantu kehidupan masyarakat. Bahkan, di era digital ini, sudah banyak aktivitas manusia yang semakin dipermudah dengan bantuan teknologi. Bertukar pesan dengan cepat, melakukan pembayaran non tunai hanya melalui ponsel dan terhubung pada dunia luar dengan mudah merupakan beberapa contoh di antaranya. Semua kebutuhan manusia sudah sangat dipermudah dengan perkembangan teknologi. (Apud, Handayani, and Amilia 2023)

Model Sinangkis merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara online oleh masyarakat dengan menggunakan android di playstore guna mengetahui data-data kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta program-program yang diberikan dalam hal pengentasan kemiskinan. Aplikasi ini digunakan untuk merekapitulasi data-data penduduk/warga yang telah mendapatkan subsidi maupun program yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Aplikasi sinangkis diperkenalkan sejak tahun 2019 di Kabupaten Pandeglang oleh Bupati Kabupaten Pandeglang dan sebagai penanggung jawab yaitu Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai badan yang bertanggungjawab dalam penggunaan aplikasi sinangkis. (Pembangunan 2012).

Aplikasi ini dapat di download dengan menggunakan android atau smartphone pada aplikasi playstore kemudian klik cari sinangkis pandeglang lalu download, sehingga semua orang bisa mengakses sinangkis. (Prioritas and Kemiskinan n.d.). Aplikasi sinangkis merupakan upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, khususnya kemiskinan yang saat ini sudah merambah ke pelosok desa desa terpencil di Kabupaten pandeglang yang menjadikan pandeglang masih tetap bertahan sebagai daerah

tertinggal dengan angka kemiskinan yang paling tinggi se Provinsi Banten.

Pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada pengutamaan masyarakat umum, artinya setiap pelayanan yang diinginkan masyarakat tidak boleh dikaitkan dengan urusan pribadi harus profesionalitas dalam bekerja, hak dan kewajiban merupakan jaminan terwujudnya kepastian hukum pemberi pelayanan, kebersamaan masyarakat umum tanpa membedakan adat istiadat, ras, suku, bahasa, agama, golongan, gender, dan status ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat adalah mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. (Saepudin, Laksana, and Wahyiah 2024).

Penerapan sistem pemerintahan yang diselenggarakan secara transparan dimana setiap dokumen kebijakan pemerintah mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dapat diakses oleh masyarakat luas secara terbuka tanpa adanya syarat tertentu kecuali informasi yang menjadi rahasia negara, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menilai ada atau tidaknya indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dengan demikian informasi lentang ada atau tidaknya praktek korupsi bukan lagi menjadi barang yang langka namun menjadi informasi yang bersifat "open access". Strategi ini harus diiringi dengan dukungan teknologi informasi (Studi, Publik, and Bangsa 2023).

Maka dapat disimpulkan Efektivitas Model Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SINANGKIS) Dalam Pendataan Dan Pelaporan Penduduk Miskin Di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang masih belum efektif dan belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kekurangan dan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

hasil penelitian ditemukan bahwa model aplikasi Sinangkis ini belum sepenuhnya berkoordinasi dengan semua SKPD terkait yang berada di Pandeglang salah satunya yaitu dengan Kecamatan Cikeusik, kurangnya sosialisasi dan komitmen sehingga pendataan penduduk miskin melalui Sinangkis belum terinput secara *up to date* ke dalam Aplikasi dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Aparat Kecamatan Cikeusik mengakui bahwa adanya aplikasi sinangkis tidak digunakan secara efektif dalam pendataan penduduk miskin di Kecamatan Cikeusik. Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam penerapan aplikasi model sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SINANGKIS) Dalam Pendataan Dan Pelaporan Penduduk Miskin Di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang diantaranya SDM yang kurang dan rendah dalam pengetahuan, pendataan penduduk miskin di Kecamatan Cikeusik masih menggunakan data manual dan tidak *up to date*, terhambat sinyal dan sarana prasarana teknologi sehingga program kemiskinan di Kecamatan Cikeusik masih belum merata.

REFERENSI

Jurnal

- Apud, Eli Apud Saepudin, Putri Handayani, and Rizki Amilia. 2023. "Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Akulturasi Antara Peraturan Adat Dan Digitalisasi (Studi Pada Desa Kanekes Kecamatan Luwidamar Kabupaten Lebak)." *ANTASENA: Governance and Innovation Journal* 1(2): 79-88.
- Kasus, Studi et al. 2016. "Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan." 19(3): 148-56.

- Komplementer, Produk, and Kinerja Bisnis. 2016. "Entrepreneurship Orientation Model in Supporting and Unemployment Poverty Alleviation in Rural Area." 18(1).
- Nasional, Prosiding Seminar et al. "Pengembangan Pola Kemitraan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Timur." : 601-11.
- Odel, Melalui M, and K Uadran K Emiskinan. 2020. "O PTIMALISASI I NSTRUMEN P ENANGGULANGAN K EMISKINAN." 1(iv): 8-21.
- Organisasi, Pengelolaan. 2019. "Journal of Political Science." 1(April): 32-40.
- Pembangunan, Jurnal Ekonomi. 2012. "MENGGUNAKAN MODEL TINDAKAN KOLEKTIF KELEMBAGAAN PERTANIAN." 13.
- Persentase, Perkembangan, and Penduduk Miskin. 2015. "Gambar 1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2010 - September 2014 [2]." : 1-15.
- Prioritas, Pemetaan, and Pengentasan Kemiskinan. "SIM Kemiskinan Sebagai Dasar Informasi Geografis Untuk Pemetaan Prioritas Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara." : 45-51.
- Putra, Wahyu Manuhara. 2016. "Penguji-an Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Lembaga Keuangan Mikro : Modified Delone Mcleone Model." : 53-65.
- Saepudin, Eli Apud, April Laksana, and Ita Rosita Wahyiah. 2024. "Pelayanan Publik Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Berdasarkan Tata Kelola Taat Asas." 7(1): 16-24.
- Studi, Program, Administrasi Publik, and Universitas Bina Bangsa. 2023. "Birokrasi Pemerintahan Pendekatan Sistem Hukum Moral Dan Manajemen Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Indonesia." 1: 70-78.

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

Umam, Hoerul, Muhammad Yusuf Wibisono, Dadang Kahmad, and Asep Saeful Muhtadi. 2022. "Strategi Rebranding Hubungan Masyarakat LAZISNU Pada Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Barat." 6(2): 267-85.

Buku

Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta

Abidin, Said Zainal. (2012) *Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

Hidayat, A.A. (2014). *Metode penelitian keperawatan dan teknis analisis data*. Jakarta: Salemba Medika

Soedarso, Sri Widodo. (2015). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Manggu Media.

Wongso, Fery. (2016). *Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada DinasPendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 14, No. 2, September 2016.

Marliana B. Winanti. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung.

Anggraeni, E. Y. & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. 1 penyunt. Yogyakarta: Andi.

Romney, Marshall B. dan Steinbart, (2015), "Sistem Informasi Akuntansi", Edisi 13, alihbahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan

Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.

Darmawan, D., & Fauzi, K. N. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. PT. Remaja Rosdakarya.

Siagian. Sondang P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi/tesis/disertasi

Wahid, Rusnawati. (2018). *Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di kota makassar (Skrpsi)*.

Sopian, A.Haris. (2018). *Implementasi E-Government Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang*

Giawa, Wahyu Alexandi. (2018). *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Proses Pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan (Skrpsi)*.

Faisal, Aziz. (2018). *Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang (Skripsi)*.

Firdayanti, Nuraini. (2020). *Efektivitas Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi "Bebeja" Kabupaten Pandeglang. (Skripsi)*.